

ABSTRAK

Studi ini membahas implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berupa jaminan sosial di Kabupaten Gunungkidul tahun 2018. Selain itu studi ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. secara khusus, penelitian ini berusaha menganalisis keberhasilan pengimplementasian kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berupa jaminan sosial dan menganalisis secara kritis sejauhmana pengimplementasian kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sumber daya, komunikasi, sumber daya dan disposisi mempengaruhi keberhasilan kebijakan berupa jaminan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif (*mixed methodology*). Variabel-variabel penelitian dioperasionalkan ke dalam indikator, yang dikonversikan menjadi kuesioner yang sebarakan kepada masyarakat penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu di Kecamatan Patuk, Kecamatan Nglipar, dan Kecamatan Wonosari. Data survei diperoleh dari masyarakat yang diambil secara random dan dianalisis dengan menggunakan SmartPLS 3. Tanggapan wawancara dianalisis konten untuk memvalidasi data kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini juga yaitu 99 responden.

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap disposisi atau karakteristik dan perilaku pemberi jasa layanan, dan komunikasi yang terjalin antar instansi dan penerima jasa (penyandang disabilitas) mengenai bantuan jaminan sosial, serta struktur birokrasi yang tidak panjang atau terfragmentasi dan juga sesuai SOP sudah berhasil dilaksanakan dan penerima jasa atau masyarakat penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan jaminan sosial merasa puas dengan hal tersebut. Begitu pula untuk komunikasi terhadap sumber daya, struktur birokrasi dengan disposisi dan sumber daya terhadap disposisi pada bagian ini pemberi jasa maupun penerima jasa merasa puas dan sudah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Kemudian dalam temuan penelitian ini pada pengimplementasian kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berupa jaminan sosial terdapat kendala berupa sumber daya yang tidak memadai, kurangnya sumberdaya sebagai ahli IT maupun SDM yang melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, komunikasi terhadap disposisi dan struktur birokrasi masi mengalami kendala dikarenakan jarak tempuh yang jauh antar instansi dan masyarakat serta kadang kala terjadi miss komunikasi antar instansi dalam memberikan pelayanan terutama soal pendataan jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang layak mendapatkan bantuan jaminan sosial maka untuk struktur birokrasi terhadap sumber daya pun tidak signifikan dalam pelaksanaan pelayanan jaminan sosial di Kabupaten Gunungkidul.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Sosial